POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL

Nilai Reformasi Birokrasi General dan Tematik

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

0

Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

(1) Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana.

(2) Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana

(3) Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi

Optimalisasi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

(1) Persentase kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana.

(2) Persentase bahan kebijakan bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana

- Terwujudnya data pengentasan administrasi pemerintahan yang tersedia
- Terwujudnya data pengentasan administrasi kewilayahan yang tersedia
- Terwujudnya data fasilitasi otonomi daerah yang tersedia
- Terwujudnya data pengentasan pembinaan mental spiritual yang tersedia
- Terwujudnya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial yang dilaksakan
- Terwujudnya monitoring, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat
- Terlaksananya penyaluran bantuan tribuh bidang kesiagaman sosial provinsi
  - Jumlah data pengentasan administrasi pemerintahan yang tersedia
  - Jumlah data pengentasan administrasi kewilayahan yang tersedia
  - Jumlah data fasilitasi otonomi daerah yang tersedia
  - Jumlah data pengentasan pembinaan mental spiritual yang tersedia
  - Jumlah layanan administrasi kesejahteraan sosial yang dilaksakan
  - Jumlah kebijakan dan kinerja kesejahteraan masyarakat yang dimonev
  - Jumlah bantuan tribuh yang disalurkan

Optimalisasi kebijakan layanan produk hukum

Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum dan penyebarluasan produk hukum daerah

- Terwujudnya produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan
- Terlaksananya nasihat dan layanan bantuan hukum
- Terselenggaranya dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum2
  - Jumlah produk hukum yang terdokumentasi sesuai aturan
  - Jumlah objek perkara penyelesaian bantuan hukum yang ditangani dan terselesaikan
  - Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan disebarluaskan secara online

Optimalisasi kebijakan perekonomian dan pembangunan

(1) Persentase pelaksanaan evaluasi kebijakan perekonomian dan SDA

(2) Persentase bahan kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pembangunan yang ditindaklanjuti

- Terwujudnya data pembangunan distribusi perekonomian
- Terwujudnya data pemerataan dan penggewasan ekonomi
- Terwujudnya data implementasi kebijakan perekonomian
- Terwujudnya data monitoring program pembangunan
- Terwujudnya data evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
- Terwujudnya database informasi administrasi pembangunan
- Terlaksananya mores kinerja pengentasan BLUD dan BLKD
- Terwujudnya data pengentasan pengentasan BLUD dan BLKD yang dimonev
- Terwujudnya data pengentasan distribusi perekonomian yang tersedia
- Terwujudnya data pemerataan dan penggewasan ekonomi yang tersedia
- Terwujudnya data implementasi kebijakan perekonomian yang tersedia
- Terwujudnya data monitoring program pembangunan yang tersedia
- Terwujudnya data evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tersedia
- Terwujudnya database informasi administrasi pembangunan yang tersedia
  - Jumlah kebijakan pengentasan BLUD dan BLKD yang dimonev
  - Jumlah data pemerataan dan penggewasan ekonomi yang tersedia
  - Jumlah data implementasi kebijakan perekonomian yang tersedia
  - Jumlah data monitoring program pembangunan yang tersedia
  - Jumlah data evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tersedia
  - Jumlah database informasi administrasi pembangunan yang tersedia

Optimalisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa

Indeks Data kerja PBJ

- Terlaksananya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- Terwujudnya data pengentasan PBJ
- Terlaksananya pembinaan PBJ
  - Jumlah pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
  - Jumlah data pengentasan barang dan jasa yang tersedia
  - Jumlah ASN PBJ pada SKPD yang dibimbing dan ditaati

Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah

(1) Nilai IKM SETDA

(2) Nilai Budaya Kerja SETDA

(3) Nilai SAKIP SETDA

Meningkatnya Efektivitas Layanan Administrasi Umum dan Tata Kelola Perangkat Daerah

(1) Persentase realisasi kebijakan bidang pengadministrasi umum yang terlaksana

(2) Rata-Rata capaian kinerja SKPD dan unit kerja garis koordinasi

Optimalisasi kebijakan layanan administrasi perkantoran

Persentase kebijakan layanan administrasi perkantoran yang terlaksana

- Terwujudnya pendataan dan pertanggungjawaban kantor
  - (1) Persentase pendataan dan pertanggungjawaban kantor yang tersedia
  - (2) Persentase pendataan dan pertanggungjawaban kantor yang terpenihara
- Terwujudnya dokumen pemencanaan dan pelaporan internal
  - (1) Jumlah dokumen pemencanaan SETDA yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
  - (2) Jumlah dokumen pelaporan kinerja SETDA yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
- Terwujudnya data bidang milik daerah
  - (1) Jumlah BMD yang tersedia
  - (2) Jumlah BMD yang terpenihara
- Terselenggaranya administrasi keuangan
  - (1) Jumlah dokumen akuntabilitas keuangan yang disusun tepat waktu
  - (2) Jumlah classification slips atrian kas yang dituntut
- Terselenggaranya kegiatan kesumahtanggaan sekretariat
  - Jumlah Fasilitasi layanan kesumahtanggaan penyelesai
- Terwujudnya sistem informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat
  - Jumlah informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah yang terintegrasi dan mudah diakses online
- Terwujudnya fasilitasi kegiatan gunaman dengan masyarakat
  - Jumlah kegiatan gunaman yang difasilitasi
- Terwujudnya data pelaporan keprotokolan
  - Jumlah laporan keprotokolan
- Terwujudnya dokumen perolehan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis beban kerja
  - Jumlah Perda, Perbup, Keputusan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisis ABK
- Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi pelayanan publik
  - (1) Jumlah Biggies yang nilai SKM nya baik
  - (2) Jumlah SKPD UPP yang nilai IPP nya baik
- Terwujudnya dokumen mores ketatalaksanaan
  - Jumlah SKPD yang memiliki SOP dan mores baku sesuai aturan
- Terwujudnya dokumen pelaporan SAKIP dan Reformasi Birokrasi
  - Jumlah SKPD yang nilai SAKIP nya BaikB2
  - (2) Jumlah UKP Kabupaten yang disusun dan disampaikan tepat waktu
- Terlaksananya pendampingan teknis peningkatan kinerja ASN internal
  - Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peningkatan kinerja internal
- Terlaksananya monitoring kinerja aparatur
  - Jumlah ASN yang dimonitoring kinerjanya

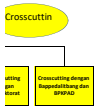
Crosscuttin
Crosscutting dengan Bappedalitbang dan BPKPAD